

Strategi Komunikasi Manajemen Pembuangan Sampah di Kota Bukittinggi

Anggi Putri Kurniadi

Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang
anggi.putri.kurniadi.unp@gmail.com
082382346379

Susi Evanita

Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang
susievanita@gmail.com
085278811760

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan dan mempersuasi masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk menerapkan hukum lingkungan mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur manajemen dan retribusi sampah/kebersihan karena ada titik kumulasi sampah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, padahal Kota Bukittinggi memenangkan penghargaan Adipura dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut. Tindakan untuk mengantisipasi masalah ini adalah melalui strategi komunikasi terhadap hukum lingkungan untuk manajemen sampah di Kota Bukittinggi dalam mencapai lingkungan yang bersih dengan menggunakan model efek hirarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sampah di Kota Bukittinggi tidak optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan hal ini, manajemen sampah tidak tertata dengan rapi yang berdampak pada degradasi lingkungan dan gangguan estetika. Studi ini merekomendasikan agar komunikasi terhadap hukum lingkungan dan implementasi manajemen sampah ditingkatkan sehingga Kota Bukittinggi dapat mempertahankan penghargaan Adipura di masa depan.

Kata kunci: strategi komunikasi, manajemen pembuangan sampah, metode hierarchy effect.

Communication Strategy for Waste Management in Bukittinggi City

ABSTRACT

This study aims to inform and to persuade the community of Bukittinggi City, especially in Mandiangin Koto Selayan Subdistrict to apply the environmental law regarding Regional Regulation Number 5 of 2014 which regulates the management and retribution of waste/cleanliness services because there is a point of waste accumulation in Mandiangin Koto Selayan Subdistrict, even though the Bukittinggi City won the Adipura award in the last three years in a row. The actions to anticipate this problem are through communication strategies on environmental law for waste management in Bukittinggi City to achieve a clean environment by using the hierarchy effect model. The results showed that the waste management in Bukittinggi City was not optimal due to the low awareness of the community in disposing waste in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2014. Based on this, waste management is not neatly arranged

which has an effect on environmental degradation and aesthetic disturbances. This study recommends that communication on environmental law and implementation of waste management be improved so that the Bukittinggi City can maintain the Adipura award in the future.

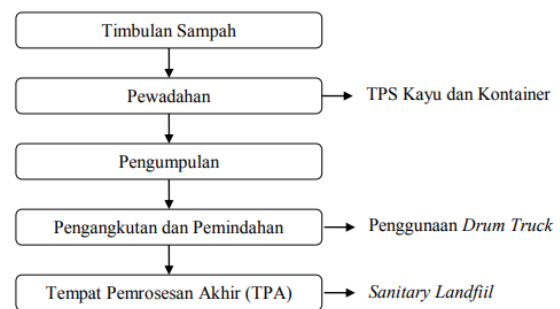
Keywords: communication strategy, waste disposal management, hierarchy effect method.

PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi memiliki keunggulan sektor pariwisata dan memiliki beberapa peninggalan bersejarah seperti, Jepang Hole, Fort De Kock Fort dan Jam Gadang. Kombinasi keduanya menjadikan Kota Bukittinggi sebagai tujuan wisata. Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memprioritaskan cipta sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan berkesan) dalam mendukung peran Kota Bukittinggi sebagai kota wisata. Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil melaksanakan cipta sapta pesona, terutama dalam hal kebersihan sebagaimana dibuktikan oleh prestasi Kota Bukittinggi yang menerima penghargaan Adipura selama tiga tahun terakhir berturut-turut.

Penghargaan Adipura yang diterima oleh Kota Bukittinggi karena adanya kerjasama semua pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Manajemen dan Retribusi pada Layanan Sampah /Kebersihan dengan ketentuan tiga poin utama yaitu, jam pembuangan sampah dari jam 06.00 sore sampai jam 06.00 pagi, sampah harus dibuang di TPS (Tempat Pembuangan

Sementara), dan sampah harus dipisahkan antara sampah basah dan kering pada saat pembuangan. Selain itu, Departemen Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi juga menetapkan skema manajemen sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan yang harus dibuang di TPS kayu dan kontainer sebelum dipindahkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yang dirangkum dalam Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1: Skema Pengelolaan Pembuangan Sampah di Kota Bukittinggi. Sumber: DLH Kota Bukittinggi.

Fenomena yang terjadi di balik penghargaan Adipura yang diterima oleh Kota Bukittinggi adalah titik penumpukan sampah. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa titik penumpukan sampah ditemukan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Kondisi yang terjadi adalah sampah berserakan di bahu jalan pada pukul 08.30 pagi. Selain itu, sampah tidak dibuang ke TPS dari kayu atau kontainer. Padahal, jumlah TPS yang disediakan oleh

pemerintah cukup besar, yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki 61 TPS, Kecamatan Guguk Panjang memiliki 102 TPS dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki 100 TPS. Kondisi titik penumpukan sampah di Kota Bukittinggi ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini:



Lokasi: Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Gambar 2: Penumpukan Sampah di Kota Bukittinggi. Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020.

Berdasarkan informasi pada Gambar 2 terlihat bahwa sistem manajemen pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bukittinggi belum baik karena tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari sampah yang di buang oleh masyarakat berada diluar jam pembuangan sampah, sampah dibuang tidak pada TPS dan sampah yang dibuang tidak dipilah antara sampah basah dan kering. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa masyarakat Kota Bukittinggi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan melakukan pembuangan sampah liar, yaitu pengelolaan

sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi belakangan ini tidak optimal karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tidak diterapkan secara berkelanjutan, sehingga manajemen pembuangan sampah tidak tertata dengan rapi yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan, gangguan estetika dan kesehatan masyarakat.

Sampah memiliki dampak besar terutama dalam pencemaran lingkungan. Manusia yang hidup di lingkungan, tidak akan terhindar dari keberadaan sampah yang ada di lingkungan. Efek sampah pada kesehatan dapat dikelompokkan menjadi efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung adalah efek yang disebabkan oleh kontak langsung dengan sampah. Efek tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat karena proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan sampah. Lokasi dan manajemen sampah yang tidak memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol adalah tempat yang cocok untuk beberapa organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Lingkungan adalah sumber penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup manusia dan organisme lain di bumi.

Efek sampah terhadap lingkungan adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan termasuk polusi udara dan polusi air. Sampah juga dapat mengganggu keberlanjutan dan keseimbangan, lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Sampah dapat menyebabkan polusi atau kontaminasi. Polusi dapat berupa udara kotor karena mengandung gas-gas yang terjadi dari perbaikan sampah, bau tidak sedap, daerah berlumpur dan terkadang berlumpur ketika musim hujan. Titik pembuangan menyebabkan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan lingkungan normal dapat menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan pH. Kurangnya oksigen di area pembuangan sampah yang disebabkan oleh proses perbaikan sampah. Gas yang dihasilkan selama degradasi sampah dapat berbahaya bagi kesehatan dan kadang-kadang bahkan beracun dan dapat mematikan.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah dipaparkan dari fakta di lapangan, terlihat bahwa masih adanya permasalahan dalam proses manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi sehingga diperlukan strategi komunikasi manajemen pembuangan sampah. Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi adalah masyarakat Kecamatan Mandiangin

Koto Selayan, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat Mandiangin Koto Selayan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Strategi komunikasi manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi memiliki misi untuk mempertahankan prestasi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang bersih. Pentingnya untuk melakukan penelitian ini adalah agar terciptanya lingkungan yang sehat dan mempertahankan keberhasilan Kota Bukittinggi dalam meraih penghargaan Adipura secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Strategi komunikasi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh praktisi (Bungin, B. H., 2009; Cox, R., 2013; Effendy, O. U., 2008). Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dalah strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Dilla, S., 2007; Fajar, M. 2009). Keterkaitan antara kebijaksanaan komunikasi, perencanaan komunikasi dan strategi komunikasi dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3: Penjabaran Perencanaan Komunikasi dari Kebijakan sampai Operasional. Sumber: (Cangara, H., 2017).

Persoalan yang timbul adalah konsep strategi komunikasi terkadang disamakan dengan kebijaksanaan komunikasi, padahal strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi (Ferguson, S. D., 2010); Natonis, R. M. 2010). Konsep strategi memang kadang juga mengalami duplikasi karena sering kali dianggap sebagai payung perencanaan jika dihubungkan dengan konsep perencanaan strategik yang nota bene adalah kebijaksanaan komunikasi. Strategi perencanaan dimaksudkan adalah perencanaan yang mencapai program jangka panjang, dimana di dalamnya mencakup kerangka kerja untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek (Fitria, L., Susanty, S. & Suprayogi, 2009; Ginige, T. & Sparks, N., 2010; Kriyantono, R. 2009). Oleh karena itu, konsep strategi komunikasi merupakan bagian dari perencanaan komunikasi dalam

mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan perencanaan strategik adalah kebijaksanaan komunikasi dalam tatarann makro untuk program jangka panjang.

Metode penyebaran informasi yang digunakan untuk mencapai target sasaran yang sifatnya massal dilakukan melalui media massa. Penggunaan media massa biasanya memakai model *hierarchy effect* (Cangara, H., 2017). Model ini memiliki dua fungsi yaitu, menginformasikan (*to inform*) dan mempersuasi (*to persuade*). Lembaga maupun perusahaan yang ingin mengenalkan suatu barang, gagasan atau inovasi kepada masyarakat luas, langkah pertama yang dilakukan adalah mengekspos melalui media massa seperti TV, Radio atau Surat Kabar (Prakosa, D., 2003; Rizal, A., 2011; Solihin, I., 2012). Tujuannya adalah berusaha mengenalkan dan menyadarkan khalayak tentang adanya barang, gangguan atau inovasi. Terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu target sasaran menyadari atau tidak menyadari hal tersebut (Surjandari, I., Hidayanto, A. & Supriyatna, A. 2009; Wheelen, T. L. & Hunger, D. J., 2004; Willoughby, J. F. & Smith H., 2016). Jika target sasaran menyadari hal itu, maka gambaran tentang barang, gagasan atau inovasi berada dalam pikiran dan daya ingat mereka. Sebaliknya jika hal itu tidak

disadari dengan sendirinya keluar dari alam pikir mereka. Apabila barang, gagasan atau inovasi yang dikenalkan tadi sudah dikenal, disadari dan berada dalam ingatan mereka maka biasanya target sasaran memiliki sikap positif terhadap gagasan tersebut. Disusul keinginan untuk mengetahuinya lebih jauh. Karena itu, penerima berusaha mencobanya dan jika dalam tahap mencoba ia memperoleh pengalaman yang berguna maka ia berusaha mengulanginya.

Fungsi informasi dalam model *hierarchy effect* yaitu: pengenalan, menyadari, sampai pada kemampuan mengingat, sedangkan fungsi persuasi mencakup sikap positif, perhatian, mencoba dan mengulangi. Dalam praktik model *hierarchy effect* media massa, maka perencanaan komunikasi diawali dengan menetapkan apa tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan komunikasi yang akan dilakukan?, apa yang akan disampaikan?, bagaimana menyampaikan?, dimana disampaikan?, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya?.

Menetapkan tujuan harus dimulai dengan apa yang ingin dicapai. Apakah tujuan itu hanya untuk penyadaran, perubahan sikap atau perubahan perilaku. Penetapan tujuan akan menentukan isi pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya bagaimana menyampaikan dan dimana disampaikan akan menentukan saluran atau

media yang akan dipilih. Demikian juga kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sangat tergantung pada situasi yang kondusif. Situasi ini bisa dilihat dari kondisi target sasaran maupun peristiwa yang tiba-tiba terjadi, misalnya bencana alam, kebijakan pemerintah dan kajian internasional yang menarik perhatian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Tahapan observasi yang digunakan adalah observasi biasa, yaitu melalui pengamatan langsung tentang proses manajemen pembuangan sampah oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Tahapan dokumentasi diperoleh dari studi kepustakaan untuk melengkapi analisis data serta memperkuat kesimpulan yang didapatkan serta laporan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi. Unit analisis yang digunakan adalah masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Proses instrumentasi dilakukan dengan model *hierarchy effect* dengan cara menginformasikan dan mempersuasi

masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi di bawah pertanggung jawaban DLH Kota Bukittinggi pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana. Manajemen sampah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014, manajemen sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Berdasarkan Renstra DLH Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah yaitu Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satpol PP untuk

tercapainya ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga dalam proses manajemen pembuangan sampah harus diiringi oleh pola manajemen yang baik agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tujuan yang dicapai dari kegiatan komunikasi manajemen pembuangan sampah di Kota Bukittinggi adalah masyarakat membuang sampah pada waktu yang telah ditetapkan, masyarakat membuang sampah pada TPS kayu atau kontainer dan masyarakat melakukan pemilahan antara sampah basah dan sampah kering pada saat pembuangan. Strategi komunikasi manajemen pembuangan sampah dilakukan dengan cara menginformasi mempersuasi masyarakat agar menerapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014.

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut; 1) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah; 2) Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya sesuai dengan

jumlah dan/atau sifat sampah; 3) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST; 4) Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan setiap hari. Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, TPST, Transfer Depo dan/atau SPA ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah; 5) Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan 6) Pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut; 1) Mengelola sampah berwawasan lingkungan; 2) Mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah; 3) Menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan; 5) emberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan 6) Membayar Retribusi pengelolaan persampahan.

Larangan bagi masyarakat terhadap sampah; 1) Memasukkan sampah tanpa izin ke daerah Kota Bukittinggi; 2) Mencampur

sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 3) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; 4) Membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah disediakan dan ditentukan; 5) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan 6) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

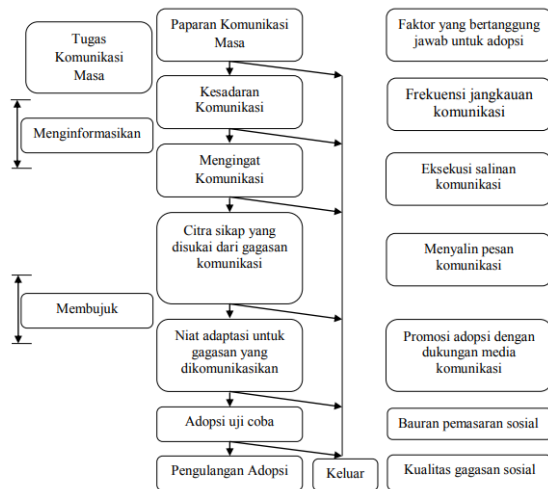
Hak setiap masyarakat tentang pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut; 1) Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat; 2) Mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan; 3) Membentuk kelompok pengelola sampah; 4) Mengelola sampah secara mandiri; 5) Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan; dan 6) Memperoleh informasi secara akurat tentang pengelolaan persampahan.

Setiap orang yang mengetahui, menduga, dan menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah. Pengaduan dapat disampaikan kepada Lurah, Camat, dan instansi teknis. Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar

dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan; 1) Inovasi terbaik dalam pengelolaan persampahan; 2) Pelaporan atas pelanggaran peraturan; 3) Pengurangan timbulan sampah; dan 4) Tertib penanganan sampah.

Metode komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang peran hukum lingkungan untuk pengelolaan sampah di Bukittinggi dilakukan melalui model efek hierarki. Model ini memiliki dua fungsi yaitu, untuk menginformasikan dan membujuk. Tahapan model *hierarchy effect* yang diringkas dalam Gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4: Model *Hierarchy Effect* (Cangara, H., 2017).

Berdasarkan informasi pada Gambar 4, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu masyarakat sadar atau tidak sadar.

Jika masyarakat menyadarinya, informasi itu ada di benak dan ingatan mereka. Sebaliknya, jika itu tidak disadari oleh diri mereka sendiri, maka informasi keluar dari pikiran mereka. Jika informasi yang disampaikan telah dipahami, direalisasikan, dan diingat maka masyarakat memiliki sikap positif terhadap gagasan dan keinginan untuk mencari tahu lebih banyak. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan peran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Layanan Sampah/Kebersihan untuk mengatur manajemen sampah. Dengan demikian, fungsi informasi dalam model ini adalah pengenalan, kesadaran, hingga kemampuan mengingat. Sementara, fungsi persuasi adalah memasukkan sikap positif, perhatian, coba dan pengulangan terhadap masyarakat. Kegiatan komunikasi dapat dilakukan dengan memberikan pesan-pesan positif melalui brosur sehingga masyarakat termotivasi dan tidak merasa dipaksa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Pesan positif tersebut diantaranya adalah:

1. Orang beriman buang sampah pada tempatnya.
2. Orang bijak dan pintar membuang sampah di bak sampah.
3. Yuk buang sampah pada tempatnya, siapapun: aku, kamu, kita semua.

4. Buanglah sampah pada tempatnya, budaya bersih dimulai dari disiplin diri.
5. Tongsa (Tong Sampah) juga butuh makan, beri makan tongsa ya teman-teman.
6. Buanglah sampah pada tempatnya, kalau mereka bisa kenapa kita tidak?

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti secara keseluruhan bahwa manajemen sampah di Kota Bukittinggi belum berjalan optimal karena masih ada titik penumpukan sampah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bukittinggi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Layanan Sampah/Kebersihan. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah, kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan limbah, larangan masyarakat untuk limbah, hak-hak masing-masing masyarakat tentang pengelolaan limbah, keluhan bagi pemerintah daerah tentang pengangkutan sampah liar dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin mengelola sampah. Penelitian ini membutuhkan

komunikasi tentang hukum lingkungan dalam bentuk sosialisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis dan Kota Bukittinggi dapat mempertahankan penghargaan Adipura di masa depan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. H. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Cox, R. 2013. *Environmental Communication and the Public Sphere*. 3rd Edition. Los Angeles (US): Sage
- Cangara, H. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dilla, S. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.
- Effendy, O. U. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Fajar, M. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori & Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ferguson, S. D. 2010. *Communication Planning an Integrated Approach*. London: Sage Publications.
- Fitria, L., Susanty, S. & Suprayogi. 2009. *Penentuan Rute Truk Pengumpul dan Pengangkut Sampah di Bandung*. Jurnal Teknik Industri, Vol. 11 No. 1, pp. 51-60.
- Ginige, T. & Sparks, N. 2010. *Moderat Waste Issues In Malta*. Law Environment and Development Journal. University of London. ISSN.

- Kriyantono, R. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Natonis, R. M. 2010. *Sistem Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Kampung Nelayan Oesapa Kupang*. Tesis UNDIP: Program Pascasarjana UNDIP Semarang.
- Prakosa, D. 2003. *Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Perumahan Aryamukti Semarang)*. Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 2, pp. 15-24.
- Rizal, A. 2011. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan Di Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. Jurnal SMARTek, 9:155-172.
- Solihin, I. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Surjandari, I., Hidayanto, A. & Supriyatna, A. 2009. *Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan*. Jurnal Teknik Industri Vol. 11 No. 2, pp 134-147.
- Wheelen, T. L. & Hunger, D. J. 2004. *Strategic Management and Business Policy, Ed 9*. United States: Prentice Hall.
- Willoughby, J. F. & Smith H. 2016 *Communication Strategies And New Media Platforms: Exploring The Synergistic Potential of Health and Environmental Communication*. Science Communication. 38(4) 535–545.
- Perda Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.